



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PANTAI BARU
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Berkat dan Anugrah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025–2029 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya prioritas pembangunan daerah, tujuan maupun sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, maka perlu perencanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru guna mewujudkan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang *Agile* (gesit), Adaptif dan Kolaboratif.

Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Baru dalam jangka waktu empat tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Pantai Baru memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2029 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2029 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pantai Baru



Camat Pantai Baru,
Micha Manubulu
Penata Tk. I
NIP. 19731212 200604 1 020

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR

..... iv

BAB I PENDAHULUAN

..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC PANTAI BARU KABUPATEN ROTE..... 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec Pantai Baru 7

2.2 Sumber Daya Kec Pantai Baru 14

2.3 Kinerja Pelayanan Kec Pantai Baru 20

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Kec Pantai Baru 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC PANTAI BARU..... 26

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kec Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao 26

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 27

3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi 28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 29

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Permasalahan-permasalahan Pelayanan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao 31

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kec Pantai Baru	33
4.2	Hubungan tujuan dan sasaran Kec Pantai Baru dengan tujuan dan sasaran RPJMD	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
5.1	Strategi	35
5.2	Arah Kebijakan	35
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Keadaan PNS Kec Pantai Baru Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	14
Tabel 2.2 Keadaan PNS Kec Pantai Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	15
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kec Pantai Baru Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan Tahun 2024	15
Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Kontrak Kec Pantai Baru Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16

Tabel 2.5	Daftar Aset Kec Pantai Baru Tahun 2024	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec Pantai Baru Tahun 2024	20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec Pantai Baru	21
Tabel 3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kec Pantai Baru	26
Tabel 3.2	Analisis SWOT Kec Pantai Baru	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kec Pantai Baru	34
Tabel 4.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kec Pantai Baru	34
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel 5.2	Hasil Evaluasi SAKIP Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan	38
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan Tahun 2025- 2029	40
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pantai Baru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45
Tabel 7.2	Perubahan Indikator Kinerja Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kec Pantai Baru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	
Kec Pantai Baru	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun

2025-2029. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka

Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Selanjutnya, RENSTRA Kecamatan Pantai Baru

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kab. Rote Ndao;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Daerah Kab. Rote ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao 2024 (Berita Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);

23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pantai Baru selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan:

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan:

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat

Daerah Pada bagian ini mencakup:

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat

Daerah Pada bagian ini mencakup :

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)

3.2 Isu Strategis

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2029

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2029.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2029.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANTAI BARU KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kab. Rote Ndao; mempunyai tugas pokok: **“Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lainnya”**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Pantai Baru mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kantor Kecamatan Pantai Baru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Kecamatan Pantai Baru memiliki susunan/ struktur organisasi sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Kesos Linmas

Pembagian Eselon dalam kedudukan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

- a. Eselon IIIa : Camat
- b. Eselon IIIb : Sekretaris Kecamatan
- c. Eselon IVa : Kepala Seksi
- d. Eselon IVb : Kepala Sub Bagian

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Kecamatan Pantai Baru antara lain:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
- f. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif Pemerintah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- d. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing seksi;
- f. Pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- g. Pelayanan administrasi kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1) Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instansi, administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan, Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidang keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- d. Penyusunan anggaran belanja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan Kerumah tanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan dan pengelolaan barang dan inventaris kantor;
- d. Pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- f. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan umum dan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petinggi dan/atau lurah;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi administrasi di Seksi Pemerintahan;
- f. Pengkoordinasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau aparatur kelurahan;
- h. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- j. Pembinaan urusan pertanahan;
- k. Pengkoordinasian dan sinkronisasi di bidang pemerintahan umum dan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan administrasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Pengkoordinasian dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- f. Pengkoordinasian dengan stakeholder yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan;
- g. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyusunan program kegiatan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan ;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya

7. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Kesos Linmas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat,fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesos dan Linmas mempunyai fungsi:

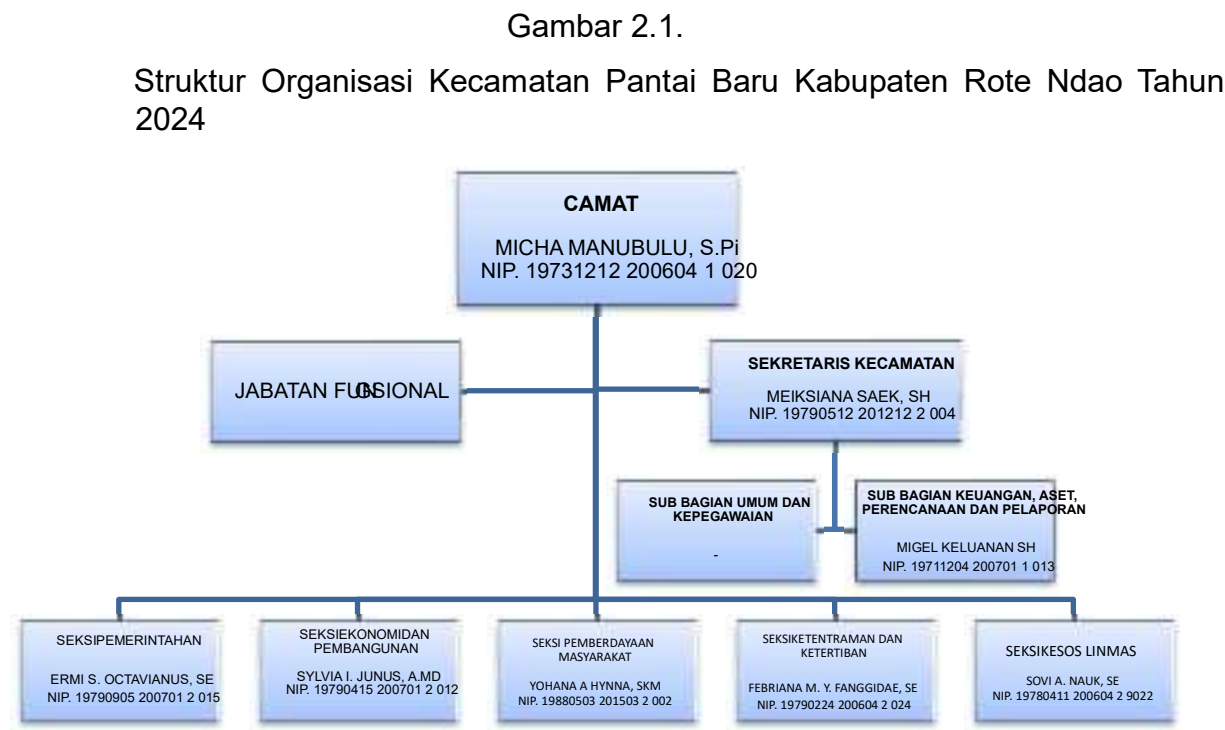
- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang Sosial dan Linmas;
- b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, perlindungan anak dan olahraga;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian penanganan bencana;
- e. Pelaksanaan administrasi di seksi Kesos dan Linmas;
- f. Penyusunan program dan pembinaan Kesos dan Linmas;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3).

- h. Koordinasi pelestarian lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan/Struktur organisasi Kecamatan Pantai Baru berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:



Sumber data: Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi Pejabat Fungsional serta yang melaksanakan kegiatan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Desember 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Kecamatan Pantai Baru sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

orang dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) berada pada Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru dan 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) berada pada Kantor Kelurahan Olafuliha'a dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3, sedangkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 3 (tiga) orang berada pada Kantor Kecamatan Pantai Baru dan 2 (dua) Tenaga Kontrak Kelurahan berdasarkan data per 31 Desember 2024.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a
Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	-	-	-
2	IV/a	Pembina	1	-	-
Jumlah Golongan IV			1	-	1
3	III/d	Penata Tk I	-	2	3
4	III/c	Penata	1	5	6
5	III/b	Penata Muda Tk I	3	2	5
6	III/a	Penata Muda	7	3	10
Jumlah Golongan III			11	12	23
7	II/d	Pengatur Tingkat I	2	-	2
8	II/c	Pengatur	2	-	3
9	II/b	Pengatur Muda Tk. I/IIB	-	-	-
10	II/a	Pengatur Muda	-	-	-
Jumlah Golongan II			4	-	5
TOTAL			16	12	28

Sumber Data Kecamatan Pantai Baru Kab. Rote NdaoTahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a

Kabupaten Rote Ndao sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, golongan III sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan golongan II sebanyak 4 (empat) orang. Sedangkan keadaan pegawai Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha’a Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha’a Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	-	-	-
2	S2	-	-	-
3	S1	4	6	10
4	D III	3	1	4
5	SLTA/SMK	10	3	15
Total		19	9	28

Sumber Data : Kecamatan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN pada Kantor Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha’a Kabupaten Rote Ndao sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah - (-) orang, S1 berjumlah 10 (sepuluh) orang, DIII berjumlah 4 (empat) orang dan SLTA/SMK berjumlah 14 (empat belas) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuloiha’a Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha’a Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
I	KECAMATAN PANTAI BARU		
1	Micha Manubulu, S.Pi 19731212 200604 1 020	Pembina/ Iva	Camat
2	Meiksiana Saek, SH 19790512 201212 2 004	Penata/ IIIc	Sekretaris
3	Febriana M. Y. Fanggidae, SE 19790224 200604 2 024	Penata Tk. I/ IIId	Kasie Trantib
4	Ermi S. Octavianus, SE 19790905 200701 2 015	Penata Tk. I/ IIId	Kasie Pemerintahan
5	Sovi Anita Nauk, SE 19780415 200604 2 022	Penata / III c	Kasie Kesos dan Linmas

6	Yohana Manapa Hynna, SKM 19880503 201503 2 002	Penata / III c	Kasie Pemberdayaan Masyarakat
7	Sylvia Imelda Junus, A.Md 19790415 200701 2 012	Penata Muda Tk. I / III b	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan
8	Migel Keluanan, SH 19711204 200701 1 013	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
9	Yohanis W. Lewar 19670308 199102 1 003	Penata Muda Tk. I / III b	Pelaksana
10	Adi Semisca Haning, S.Sos 19850831 201503 1 002	Penata Muda I / III a	Pelaksana
11	Yohanis Beda 19680515 200604 2 029	Penata Muda / III a	Pelaksana
12	Elastri Pah 19741002 200604 2 021	Penata Muda / III a	Pelaksana
13	Henny H. F. Nauk 19771016 200604 2 018	Penata Muda / III a	Pelaksana
14	Welhelmeca Saek 19700517 200701 1 002	Penata Muda / III a	Pelaksana
15	Wehelmince Lima 19740517 200701 2 015	Penata Muda / III a	Pelaksana
16	Jebi G. Lusi 19760111 200701 1 020	Penata Muda / III a	Pelaksana
17	Yance A. Polin 19700123 200604 1 003	Pengatur Tk.I / II d	Pelaksana
18	Adrianus Teti 19741123 199603 1 004	Pengatur Tk.I / II d	Pelaksana
19	Roni J. Thobias 19820729 200806 1 001	Pengatur / II c	Pelaksana
20	Yunce Kornelis Manu 19790619 201406 1 007	Pengatur / II c	Pelaksana
II	KELURAHAN OLAFULIHA'A		
21	Jekson O. Tulle 19741020 200604 1019	Penata / IIIC	Lurah
22	Welhelmintje Monding, SE 19810904 201503 2 002	Penata / IIIC	Seklur
23	Swempri O. H. Lapaan, A.Md.Par 19821002 200501 1 006	Pengatur Muda / IIIA	Kasie Pemerintahan
24	Jeffry W. Serah, SH 19790607 200701 1 016	Penata Muda Tk. I / IIIB	Kasie dan Pembangunan kemasyarakatan
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
25	Frengki A. Tulle, SP 19750405 200701 1 029	Penata Muda Tk. I / IIIB	Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum

26	Muchtar W. Rivay, A.MdT 19780627 200904 1 005	Penata Muda Tk. I / IIIB	Pelaksana
27	Joni Dethan 199820611 200701 1 008	Penata Muda / IIIA	Pelaksana
28	Yoce Marune Dupe 19701003 200701 1 021	Penata Muda / IIIA	Pelaksana

Sumber Data : Kelurahan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Kantor camat Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.

Jumlah Tenaga Kontrak Kecamatan Pantai Baru Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Junus Beda	Cleaning Servis	1	-	1
2	Abjun A. Muskananfolo	Tenaga Administrasi	1	-	1
3	Yeskiel Manafe, S.Pd	Tenaga Administrasi	1	-	1
Total			3	-	3

Sumber Data: Kecamatan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki yang menduduki jabatan Cleaning Servis sebanyak 1 (satu) orang, tenaga administrasi 2 (dua) orang sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah Tenaga Kontrak daerah tersebut diatas yang ada di Kecamatan Pantai Baru berdasarkan pembiayaan oleh Perangkat Daerah Dinas PKO yang diperbantukan di Kecamatan Pantai Baru utuk melaksanakan tugas sebagai tenaga Cleaning Servis dan Tenaga Administrasi.

2. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Badan / mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya. Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan aset berjumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) unit berdasarkan data per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Kecamatan Pantai Baru Tahun 2024

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah /Volume	Keadaan Barang (B/KB/RB)
*Tanah dan Bangunan			
1. Tanah Bangunan	1969	2.500 M2	B
2. Tanah Bangunan Gedung	1980	12.000 M2	B
3. Tanah Lapangan Sepak Bola	1980	7.255 M2	B
4. Bangunan Gedung	1987	1	KB
5. Bangunan Rumah Dinas Camat	2009	1	KB
6. Bangunan Rumah Dinas Sekcam	2018	1	B
7. Bangunan Rumah Dinas Pegawai	1999	5	KB
8. Bangunan Rumah Dinas Pegawai	2000	4	KB
*Kendaraan Operasional			
1. Sepeda Motor Yamaha YT	2002	1	RB
2. Sepeda Motor Honda WIN	2004	1	RB
3. Sepeda Motor Honda Mega Pro	2010	2	B
4. Micro Bus Isuzu	2011	1	KB
5. Kendaraan Roda 3 Viar	2013	1	RB
6. Sepeda Motor Honda Revo	2014	1	KB
7. Sepeda Motor Honda CB 150 R	2018	1	B
8. Sepeda Motor Honda Vario 149	2019	1	B
9. Sepeda Motor Honda GT MX	2020	1	B
10. Sepeda motor Yamaha Vixion 150	2020	1	B
11. Sepeda Motor Yamaha Mio SE88	2021	1	B
12. Sepeda Motor Yamaha Mio SE88	2022	1	B
*Peralatan Kerja			
1. Laptop e-Machine	2009	1	KB
2. Laptop-Dell	2017	1	KB
3. Laptop-Lenovo	2020	2	B
4. Note Book- Acer	2012	3	KB
5. Note Book- Acer	2013	2	KB
6. Note Book- Acer	2014	1	KB
7. Printer Canon MP 250	2010	1	KB
8. Printer Canon ip2770	2012	2	KB
9. Printer Canon MP2500	2014	1	KB
10. Printer Canon MP280	2017	2	B

11. Printer Canon MP280	2020	1	B
*Perlengkapan			
1. Kursi kayu	2003	8	KB
2. Kursi putar	1991	1	B
3. Kursi Plastik Napoli	2008	45	B
Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah /Volume	Keadaan Barang (B/KB/RB)
4. Kursi Plastik Napoli	2009	67	B
5. Kursi Kerja Fernekel	2011	7	B
6. Kursi Keja Jati	2011	15	B
7. Kursi Kerja Pimpinan Fernekel	2014	2	B
8. Kursi Kerja Putar Fernekel	2014	1	B
9. Kursi Sofa Jepara Spon	2014	1	B
10. Kursi Sofa	2008	1	B
11. Bangku Panjang Kayu	2009	6	KB
12. Meja biro	2003	1	B
13. Meja ½ Biro Jati	2011	6	B
14. Meja ½ Biro Jati	2010	2	B
15. Meja Biro Jati	2011	15	B
16. Lemari kayu	2003	2	KB
17. Lemari Arsip Kayu	2009	2	B
18. Lemari Arsip Dinamis	2011	4	B
19. Filing Cabinet 4 Susun	2009	2	B
20. Papan White Board	2007	1	KB
21. AC Politron	2018	1	B
22. AC Politron	2019	1	B
23. Kipas Angin Maspion	2009	1	B
24. Genset Honda	2009	1	RB
25. Camera Video	2014	1	B
26. Microfon Wireles	2010	2	KB
27. Kain Gordyn	2010	10	B

Catatan : Keadaan 31 Desember 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pantai Baru

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

TABEL 2.6.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. PANTAI BARU
TAHUN 2021-2024

INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET SPM	TARGET IKU	TARGET IKK	TINDAK TOR	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4		5	6	7	7		8	9	10	10		11	12	13	13
Indeks kepuasan masyarakat (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78,14	80	100	100	100	78,14	80,00
Presnetase penyelesaian pengaduan masyarakat (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78,14	80	100	100	100	78,14	80,00
Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan adaministradi desa (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100	100	100	100	85,00

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran Kecamatan Pantai Baru selama tahun 2021-2023 dengan capaian di atas 97% dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100%. untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kecamatan Pantai Baru Periode Tahun 2021 - 2024

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke								Realisasi Capaian Tahun Ke								Rasio Capaian Tahun Ke								Unit Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan																										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.285.946.800	100 %	2.247.797.300	100 %	1.891.762.000	100 %	2.247.072.659	100	1.867.697.466	100	2.179.725.119	100	1.880.089.620	100	2.217.414.152	100	82	100	97	100	99	100	99	Kec. Panbar
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100		100		100		100		100		100		100		100		
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	126.000.000	12 Dokumen	95.999.900	18 Dokumen	36.540.800	18 Dokumen	50.150.000	11	115.539.000	12	95.999.900	12	36.540.800	18	50.150.000	91,667	92	100	100	66,667	100	100	100	Kec. Panbar
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD dan Perubahan DPA PD	12 nDokumen	126.000.000	12 nDokumen	95.999.900	18 nDokumen	36.540.800	n		11	115.539.000	12	95.999.900	12	36.540.800			91,667	92	100	100	66,667	100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							18 Dokumen	50.150.000						18	50.150.000							100	100	Kec. Panbar	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Orang	2.010.405.000	36 Orang	1.854.169.900	38 Orang	1.704.597.000	41 umeOrang	2.076.363.659	36	1.618.472.666	36	1.788.597.719	38	1.704.597.000	41	2.049.691.752	100	81	100	96	100	100	100	99	Kec. Panbar
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28 Ora	1.970.405.000	28 Ora	1.814.170.000					28	1.580.902.666	28	1.748.597.819				100	80	100	96					Kec. Panbar	
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ng		ng		26 Orang	1.661.517.000	29 Orang	2.032.533.659					26	1.661.517.000	29	2.005.861.752					100	100	100	99	Kec. Panbar
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	8 Ora ng	40.000.000	8 Ora ng	39.999.900	12 Lap oran	43.080.000			8	37.570.000	8	39.999.900	12	43.080.000			100	94	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD							12 Dokumen	43.830.000						12	43.830.000							100	100		Kec. Panbar
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bin	9.993.000	12 Org/ Bin	10.200.000	12 bin	11.520.000	12 Dokumen	11.520.000	12	9.993.000	12	10.200.000	12	11.520.000	12	10.960.000	100	100	100	100	100	100	100	95	Kec. Panbar
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	12 bin	9.993.000	12 Org	10.200.000	12 bin	11.520.000			12	9.993.000	12	10.200.000	12	11.520.000			100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			/Bin				12 Dokumen	11.520.000						12	10.960.000							100	95,139	Kec. Panbar	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	3 Org/ Bin	30.000.000	3 org/ bin	30.000.000		-	ume	-	2	22.500.000	2	27.500.000		-	-	66,667	75	66,667	92					Kec. Panbar	
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Tertaksananya Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Daerah	3 org/ bin	30.000.000	3 org/ bin	30.000.000					2	22.500.000	2	27.500.000				66,667	75	66,667	92					Kec. Panbar	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																									Kec. Panbar
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	49.073.300	100 %	119.182.000	100 %	91.549.200	100 %	59.035.000	100	40.717.300	100	119.182.000	100	91.549.200	100	59.035.000	100	83	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar

22

	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan								12								100									Kec. Panbar
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan	13.770.000							12	11.810.813								100	85,772	Kec. Panbar

Renstra Kec. Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2022-2025-

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	26.518.200	100 %	42.952.500	100 %	37.055.000	100 %	36.234.000	100	26.518.200	100	42.952.500	100	25.382.620	100	35.766.587	100	100	100	100	68,5	100	99	Kec. Panbar	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	12 Unit	17.823.000	12 Unit	34.260.000	12 unit	34.860.000			5	17.823.000	5	34.260.000	6	23.187.620		41,667	100	41,667	100	50	67			Kec. Panbar	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit		1 Unit						1		1					100		100						Kec. Panbar	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								12 Unit	36.234.000						12	35.766.587						100	99	Kec. Panbar	
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	12bln	4.072.700	12 bln	4.070.000	12bln	2.195.000			12	4.072.700	12	4.070.000	12	2.195.000		100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara																								Kec. Panbar	
18	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	4.622.500	1 Unit	4.622.500					1	4.622.500	1	4.622.500				100	100							Kec. Panbar	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi																								Kec. Panbar	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Tertaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	923.702.472	100 %	941.815.272	100 %	306.840.000	100 %	302.500.000	100	916.962.472	100	941.815.272	100	306.840.000	100	302.500.000	100	99	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
		Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	100 %		100 %		100 %		100 %		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar	
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat	100 %	68.998.500	100 %	73.635.400	100 %	25.900.000	100 %	36.300.000	100	62.258.500	100	73.635.400	100	25.900.000	100	36.300.000	100	90	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
19	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah	Tersedianya usulan prioritas	15 Kali	39.999.500	15 Kali	42.923.400	15 kali	19.950.000			15	33.259.500	15	42.923.400	15	19.950.000		100	83	100	100	100	100			Kec. Panbar	
	Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																								Kec. Panbar	
20	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tertaksananya Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	12bln	28.999.000	12 bln	30.712.000	12bln	5.950.000			12	28.999.000	12	30.712.000	12	5.950.000		100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							44 Laporan	36.300.000						44	36.300.000							100	100	Kec. Panbar	
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tertaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100 %	854.703.972	100 %	868.179.872	100 %	280.940.000	100 %	266.200.000	100	854.703.972	100	868.179.872	100	280.940.000	100	266.200.000	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	75.000.000			100	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000		100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar	

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan						1 Lem bag a Kem asy arak atan	36.540.000						1	36.540.000							100	100	Kec. Panbar		
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	1 Kelu	554.585.972	100 %	554.135.972	1 Pok	45.333.000	1 Unit	29.158.000	1	554.585.972	100	554.135.972	1	45.333.000	1	29.158.000	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar	
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 %	200.118.000	100 %	214.043.900	100 %	124.067.000			100	200.118.000	100	214.043.900	100	124.067.000			100	100	100	100	100			Kec. Panbar	
		Honorarium Kader pembangunan Manusia. Honorarium Kader posyandu, Honorarium/upah bulanan (kaling,LPM,RW,RT), Kegiatan PPK, Pencegahan Stunting			12 Bulan								12							100						Kec. Panbar	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							1 Pok mas / Ormas	105.502.000						1	105.502.000							100	100	Kec. Panbar	
23	Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Operasional Kelurahan untuk evaluasi dan monitoring	1 Kelu	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	36.540.000			1	50.000.000	100	50.000.000	100	36.540.000			100	100	100	100	100			Kec. Panbar	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan							12 Lap	95.000.000						12	95.000.000							100	100	Kec. Panbar	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100 %	42.000.000	100 %	26.480.000	100 %	6.800.000	100 %	6.660.000	100	42.000.000	100	26.480.000	100	6.800.000	100	6.660.000	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar	
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	42.000.000	100 %	26.480.000	100 %	6.800.000	100 %	6.660.000	100	42.000.000	100	26.480.000	100	6.800.000	100	6.660.000	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar	
23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Fasilitasi Pencegahan Bangunan Liar di Ruas Jalan	100 %		100 %						100		100					100		100					Kec. Panbar		
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kabupaten/Provinsi/Nasional Terselaikannya penanganan pengaduan masyarakat	12bln	42.000.000	12 bln	26.480.000	12bln	6.800.000			12	42.000.000	12	26.480.000	12	6.800.000			100	100	100	100	100			Kec. Panbar	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							12 Lap oran	6.660.000						12	6.660.000							100	100	Kec. Panbar	
			100 %	3.251.649.272	100 %	3.216.092.572	100 %	2.205.402.000	100 %	2.556.232.659	100	2.826.659.938	100	3.148.020.391	100	2.193.729.620	100	2.526.574.152	100	87	100	98	100	99	100	99	Kec. Panbar
																		100		100		100		100		Kec. Panbar	
																		ST		ST		ST		ST			

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait. Pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Kecamatan Pantai Baru Periode Tahun 2021 - 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Tahun Ke								Unit Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	5		12		13		14		15		16
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan												
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100	94	100	82	100	97	100	99	100	99	Kec. Panbar
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100		100		100		100		100		
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90	98	91,66667	92	100	100	66,667	100	100	100	Kec. Panbar
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD dan Perubahan DPA PD	86	97	91,66667	92	100	100	66,667	100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100							100	100	Kec. Panbar
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	94	100	81	100	96	100	100	100	99	Kec. Panbar
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	88	100	80	100	96					Kec. Panbar
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	99					100	100	100	99	Kec. Panbar
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	100	98	100	94	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100	100							100	100	Kec. Panbar
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	99	100	100	100	100	100	100	100	95	Kec. Panbar
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	95,14							100	95,14	Kec. Panbar
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	67	83	66,67	75	66,67	92					Kec. Panbar
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Daerah	67	83	66,67	75	66,67	92					Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi										Kec. Panbar	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya AdmiKepegawaiannistrasi Umum Perangkat Daerah	100	96	100	83	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100	100	100	100					Kec. Panbar
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											Kec. Panbar
8	Penyediaan Bahan Material / Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	100	100	100							Kec. Panbar
		Tersedianya Alat Tulis Kantor											Kec. Panbar
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	100			100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100							100	100	Kec. Panbar
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100	100	100	100	100				Kec. Panbar
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100							100	100	Kec. Panbar
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	97	91	90	73	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100							100	100	Kec. Panbar
6	Pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100			100	100	Kec. Panbar
11	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100	100	100	100	100	100					Kec. Panbar
12	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubeler yang tersedia	100	100			100	100					Kec. Panbar
13	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Yang disediakan	100	100			100	100					Kec. Panbar
7	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96	100	100	100	100	100	100	100	86	Kec. Panbar
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			100								Kec. Panbar
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Belanja Listrik			100								Kec. Panbar

		Jumlah Langganan Internet			100								Kec. Panbar
		Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air			100								Kec. Panbar
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								100	85,772		Kec. Panbar
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92	100	100	100	100	100	68,5	100	99	Kec. Panbar
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	44	89	41,67	100	41,67	100	50	67			Kec. Panbar
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			100		100						Kec. Panbar
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								100	99		Kec. Panbar
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara											Kec. Panbar
18	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	100	100	100							Kec. Panbar
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi											Kec. Panbar
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
		Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	100		100		100		100		100		Kec. Panbar
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat	100	98	100	90	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
19	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah	Tersedianya usulan prioritas	100	94	100	83	100	100	100	100			Kec. Panbar
	Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											Kec. Panbar
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100							100	100	Kec. Panbar

10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	100	100							100	100	Kec. Panbar
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100			Kec. Panbar
		Honorarium Kader pembangunan Manusia. Honorarium Kader posyandu, Honorarium/upah bulanan (kaling, LPM, RW, RT), Kegiatan PPK, Pencegahan Stunting				100							Kec. Panbar
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	100							100	100	Kec. Panbar
23	Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Operasional Kelurahan untuk evaluasi dan monitoring	100	100	100	100	100	100	100				Kec. Panbar
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan									100	100	Kec. Panbar
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Katertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Panbar
23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Fasilitasi Pencegahan Bangunan Liar di Ruas Jalan			100		100						Kec. Panbar
		Kabupaten/Provinsi/Nasional Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100				Kec. Panbar
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									100	100	Kec. Panbar

			100	96	100	87	100	98	100	99	100	99	Kec. Panbar
					100		100		100		100		Kec. Panbar
					ST		ST		ST		ST		

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANTAI BARU
KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pantai Baru	Keterbatasan kualitas dan kualifikasi SDM	Kurangnya pemberdayaan SDM Aparatur
		Kurangnya sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat	Sering terjadinya konflik terkait permasalahan tanah
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrembang di dusun, desa/kelurahan
		Masih terbatasnya cakupan pelayanan pemerintahan pemabngunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat desa/kelurahan

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan, serta toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
2. Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten, sering kali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hukum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.
3. Kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif
4. Peran aktif PKK yang perlu ditingkatkan lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan di desa/kel dan kecamatan.
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Desa/Kelurahan yang masih minim seringkali menjadi faktor penghambat dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah didukung oleh penelitian dan pengembangan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 antara lain:

- 1. Terwujudnya perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas
- 2. Meningkatkan penerapan kelitbangan dan inovasi daerah

Tujuan dan sasaran Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2029

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Renstra Kec. Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029	2
	7

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	SPM/IK K/LAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN					KINERJA AKHIR RPD
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					REALISASI	TARGET	2026	2027	2028	2029	2029	
									2024	2025						
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks kerpuasan Masyarakat (poin)	Poin	rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik yaang melakukan survei kepuasan masyarakat	IKU	80	82	84	86	88	90	90	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Ketahanan Bencana			Angka Kriminalitas (Kasus)	Kasus	Poin	IKU	72	73	74	75	76	77	77	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa			Indeks Desa Membangun (poin)	Poin		IKU	376	351	326	301	276	251	251	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71	0,71	
				Merningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat/ jumlah pengaduan masyarakat x 100	IKD	100	100	100	100	100	100	100	
					Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan adaministradi desa	%	Persentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi desa/ Total Desa yang ada di kecamatanx 100	IKD	NA	100	100	100	100	100	100	

					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif/ Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100	IKD	100	100	100	100	100	100	100
--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 4.2
Cascading Kantor Camat Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	PPROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA						UNIT KERJ A/BID ANG
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	KONDISI AKHIR KINERJA	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Merningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan			Rata-rata nilai indek kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	75	80	85	90	95	100	100	Sekre tariat
Meningkatnya	Meningkatnya	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaa, penganggaran dan evaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
Implementasi Reformasi Birokrasi dan	kinerja penyelenggaraan tugas		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian	%	100							
			Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
Kualitas	pemerintahan,	1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dok	19	22	22	22	22	22	110	
Pelayanan Publik	pembangunan	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	15	15	15	15	15	75	
	dan kemasyarakatan	2 Evaluasi kinerja persngkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	7	7	7	7	7	7	35	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prrsentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	12	12	12	12	12	12	60	
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Dok	1	1	1	1	1	1	5	
		3 SKPDAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SKPDPresentase penyediaan administrasi BMD perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

	5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	5	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan pelayanan umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	5	
	7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	2	13	13	13	13	54	
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	3	3	3	13	
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2	2	2	2	9	
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	
	5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	
	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pemerintahan Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	15	15	15	15	65	

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan		Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Pemerintahan dan
			Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Eksternal
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah dokumen penugasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	13	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi	Dok	4	4	4	4	4	4	20	
	III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	%	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan

		1	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	aan
		14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	lembaga	18	18	18	18	18	18	90	
		15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	orang	55	45	55	55	55	55	265	
		1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan kelurahan	%	100							
		16	Sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
		17	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	Laporan	18	18	18	18	18	18	90	
		18	Evaluasi kelurahan	Jumlah hasil evaluasi kelurahan	Laporan	12	12	12	12	12	12	60	
		IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Tranti b
		1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
		19	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	
		V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	Keso slinm
		1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dok	15	15	15	15	15	15	15	as
		20	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V STRAEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Kecamatan Pantai Baru
2. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan Penerapan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatkan Inovasi Pembangunan Daerah

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui diklat jabatan fungsional perencanaan
2. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat dan penyusunan dokumen perencanaan daerah
3. Membangun pola kemitraan dalam menyediakan data dan informasi pembangunan yang berkualitas secara berkala (Kecamatan Pantai Baru, BPS, DKISP dan PD terkait)
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

- Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan tepat waktu dan menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan maupun dengan dokumen penganggaran
- Penyusunan perencanaan sesuai regulasi perencanaan dan berbasis e-planing (SIPD)
- Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Perangkat daerah, lembaga mitra/LSM dan pemangku kepentingan lainnya
- Sinkronikasi perencanaan daerah dengan provinsi dan nasional
- Peningkatan kegiatan penelitian dan pengkajian untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan
- Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan penelitian dan pengkajian
- Peningkatan Inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao seperti pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2029			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pantai Baru	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Kecamatan Pantai Baru	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui diklat jabatan fungsional perencana
		Meningkatkan sosialisasi permasalahan hukum masyarakat	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
			Melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum ke masyarakat
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar hukum
			Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan
		Meningkatkan cakupan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Menyelenggarakan diklat untuk meningkatkan produktifitas UMKM di desa/kelurahan
			Melakukan pelatihan untuk meningkatkan mutu produktifitas UMKM

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Pantai Baru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang 21	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kond. KnjPd Akhir Periode Renstra PD			
						Target 7	Rp 8	Targ 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20		
1	2	3	4	5		75		80		80,00		85,00		90,00		95,00		100		Sekretariat	22
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan				Rata-rata nilai indek kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	75		80		80,00		85,00		90,00		95,00		100			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan,	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	20	1.891.587.097	100	1.910.502.000	100	2.267.610.913	100	2.290.267.873	100	2.313.151.403	100	2.336.263.768	100	11.117.795.957		
				Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian	%	40		100		100		100		100		100		100			
				Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%	100															
				Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100		100		100		100		100		100		100			
	pembangunan dan kemasyarakatan	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dok	100	50.150.000	19	52.064.903	19	52.064.903	19	52.566.403	19	53.072.918	19	53.584.498	95	263.353.625	Kab. RN	
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	12	50.150.000	12	50.150.000	12	50.150.000	12	50.651.500	12	51.158.015	12	51.669.595	60	253.779.110	Kab. RN	
				Evaluasi kinerja persngkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	0	7	1.914.903	7	1.914.903	7	1.914.903	7	1.914.903	7	1.914.903	35	9.574.515	Kab. RN
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prrsentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%	27	1.750.497.097	100	1.750.497.097	100	1.968.567.222	100	1.988.252.894	100	2.008.135.423	100	2.028.216.777	500	9.743.669.414	Kab. RN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Blh	27	1.706.667.097	29	1.706.667.097	29	1.902.909.162	29	1.921.938.254	29	1.941.157.636	29	1.960.569.213	145	9.433.241.361	Kab. RN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1	43.830.000	1	43.830.000	1	65.658.060	1	66.314.641	1	66.977.787	1	67.647.565	5	310.428.052	Kab. RN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi BMD perangkat daerah tepat waktu	%	1	11.520.000	100	11.520.000	100	11.160.000	100	11.271.600	100	11.384.316	100	11.498.159	500	56.834.075	Kab. RN
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	11.520.000	1	11.520.000	1	11.160.000	1	11.271.600	1	11.384.316	1	11.498.159	5	56.834.075	Kab. RN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan pelayanan umum perangkat daerah	%		41.550.000	100	58.550.000	100	112.380.788	100	113.504.596	100	114.639.642	100	115.786.038	500	514.861.064	Kab. RN
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	1	3.000.000	1	2.047.950	1	2.068.430	1	2.089.114	1	2.110.005	5	11.315.498	Kab. RN
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket		0	13	14.000.000	13	88.642.140	13	89.528.561	13	90.423.847	13	91.328.085	65	373.922.634	Kab. RN
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	15.492.000	3	15.492.000	3	10.030.515	3	10.130.820	3	10.232.128	3	10.334.450	15	56.219.913	Kab. RN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.950.000	2	10.950.000	2	5.700.183	2	5.757.185	2	5.814.757	2	5.872.904	10	34.095.029	Kab. RN				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13	15.108.000	1	15.108.000	1	5.960.000	1	6.019.600	1	6.079.796	1	6.140.594	5	39.307.990	Kab. RN				

		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	3	13.770.000	100	13.770.000	100	67.995.000	100	68.674.950	100	69.361.700	100	70.055.316	500	289.856.966	Kab. RN
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	13.770.000	1	13.770.000	1	67.995.000	1	68.674.950	1	69.361.700	1	70.055.316	5	289.856.966	Kab. RN
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Pemerintahan Daerah	yang Disediakan Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	%	100	24.100.000	100	24.100.000	100	55.443.000	100	55.997.430	100	56.557.404	100	57.122.978	500	249.220.813	Kab. RN
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.100.000	15	24.100.000	15	55.443.000	15	55.997.430	15	56.557.404	15	57.122.978	75	249.220.813	Kab. RN

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-		Kab. RN
			Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-		Kab. RN
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-		Kab. RN
	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	%	100	-	100	26.272.000	100	26.720.000	100	26.987.200	100	27.257.072	100	27.529.643	500	134.765.915	Pemerintahan	Kab. RN
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah dokumen penugasan	%	100	-	26.272.000		26.720.000		26.987.200		27.257.072		27.529.643	-	134.765.915	Ekban	Kab. RN	
	13	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi	Dok	4	-	4	26.272.000	4	26.720.000	4	26.987.200	4	27.257.072	4	27.529.643	20	134.765.915		Kab. RN
	III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	%	100	72.840.000	100	283.450.000	100	283.450.000	100	286.284.500	100	289.147.345	100	292.038.818	500	1.434.370.663		
	1	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan desa	%	100	72.840.000		100.590.000		100.590.000		101.595.900		102.611.859		103.637.978	-	509.025.737		
	14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	lembaga	18	36.540.000	25	50.647.000	25	50.647.000	25	51.153.470	25	51.665.005	25	52.181.655	125	256.294.129		
	15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	orang	55	36.300.000	25	49.943.000	25	49.943.000	25	50.442.430	25	50.946.854	25	51.456.323	125	252.731.607	Pemberdayan dan Ekban	
	2	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan	Persentase pemberdayaan kelurahan	%	100	207.860.000	100	182.860.000	100	182.860.000	100	184.688.600	100	186.535.486	100	188.400.841	500	925.344.927		
	16	Kelurahan Sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	1	29.158.000	100	29.158.000	100	29.158.000	100	29.449.580	100	29.744.076	100	30.041.517	500	147.551.172		Kab. RN
	17	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Laporan	18	103.702.000	45	103.702.000	55	103.702.000	55	104.739.020	55	105.786.410	55	106.844.274	265	524.773.705		Kab. RN
	18	Evaluasi kelurahan	Jumlah hasil evaluasi kelurahan	Laporan	12	75.000.000	45	50.000.000	0	50.000.000	0	50.500.000	0	51.005.000	0	51.515.050	45	253.020.050		Kab.

	IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berjin pada jalan	%	100	6.660.000	100	6.783.000	100	6.783.000	100	6.850.830	100	6.919.338	100	6.988.532	500	34.324.700	Tranti b	Kab. RN, Prov.N TT dan
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	6.660.000	1	6.783.000	58	6.783.000	58	6.850.830	58	6.919.338	58	6.988.532	233	34.324.700		
	19	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.660.000	1	6.783.000	1	6.783.000	1	6.850.830	1	6.919.338	1	6.988.532	5	34.324.700		
	V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	-	100	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	116	75.000.000	Kesos Linma s	Kab. RN, Prov.N
	1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Dok	15	-	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	75	75.000.000		
	20	pengawasan pemerintahan desaFasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desaJumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	15	-	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	75	75.000.000		
						1.971.087.097		2.242.007.000		2.599.563.913		2.625.390.403		2.651.475.158		2.677.820.761	-	12.796.257.235		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikatorindikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pantai Baru, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029										
NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN				KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik yaang melakukan survei kepuasan masyarakat	80	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat/ jumlah pengaduan masyarakat x 100	NA	100	100	100	100	100	100
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan adaministradi desa	%	Persentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi desa/ Total Desa yang ada di kecamatanx 100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif/ Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100	85	90	95	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi
Perangkat

Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao 2025-2029 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh
Aparatur

Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

Olafuliha'a, Januari 2025

Camat Pantai Baru
Kabupaten Rote Ndao,



Micha Manubulu, S.Pi
Penata Tk. I
NIP. 19731212 200604 1 020